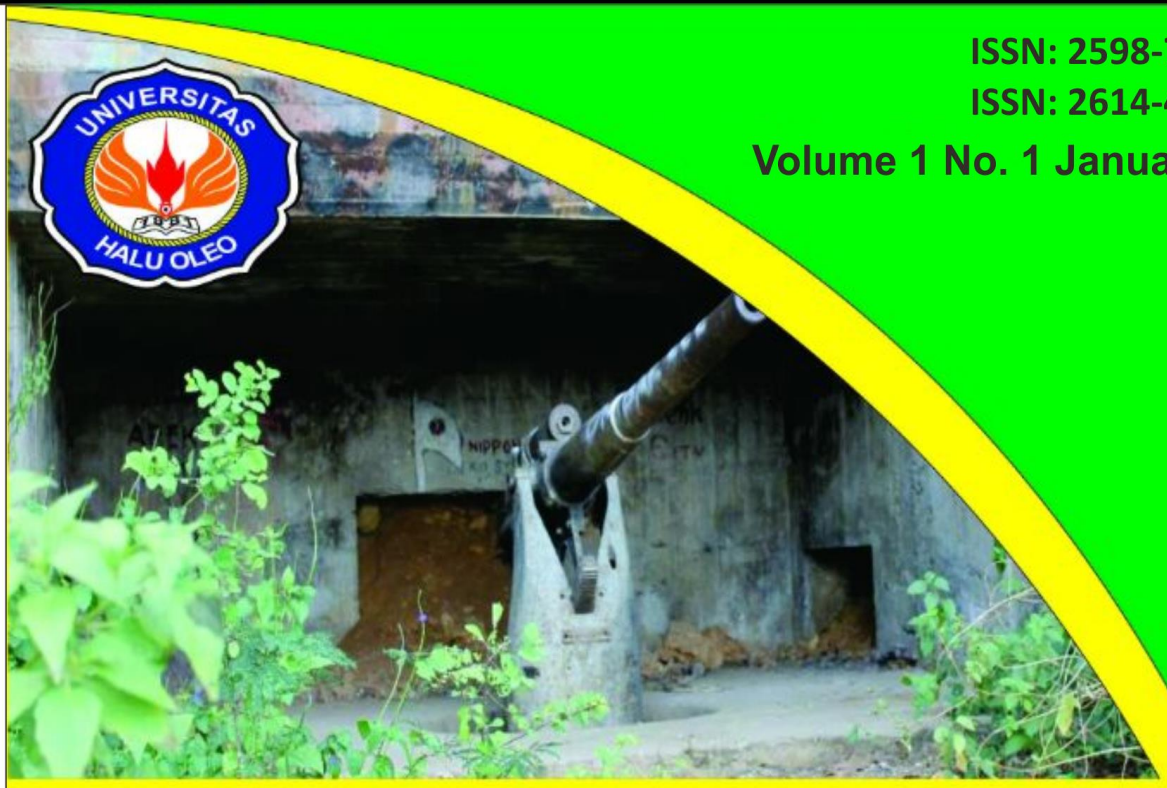
ISSN: 2598-7828 (Cetak)
ISSN: 2614-4395 (Online)
Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2018



JOURNAL IDEA OF HISTORY



Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
Kendari

JOURNAL IDEA OF HISTORY Volume 1 No. 1 Januari - Juni 2018

Journal Idea Of History

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Pimpinan Redaksi
Dr. Aslim, M.Hum.

Pelaksana Redaksi
Dra. Aswati M, M.Hum
Sarman, S.Pd.,M.Pd
Sri Damayanti Djafar, S.Pd.,M.Pd
Suharni Suddin, S.Pd.,M.Pd.
Hasni Hasan, S.Pd., M.Si.
Evang Asmawati, S.Pd, M.Hum.
Nasihin, S.S., M.A.
Khabiirun, S.Sos, M.Sos.

Mitra Bestari
Dr. Rifai Nur, M.Hum
Dr. La Ode Ali Basri, M.Hum
Basrin Melamba, S.Pd.,MA

Penyunting:
Sarman, S.Pd.,M.Pd
Faika Burhan, S.S., M.A.

Desain Grafis:
Masrin, S.IP., MAP.

Alamat Redaksi
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
JL. H.E.A Mokodompit Kendari

DAFTAR ISI

SEJARAH GEREJA KRISTEN PROTESTAN
DI KOTA KENDARI (1928-2016)……. 1-6
Robin Hood Adam
Aswati Mukadas

EKSISTENSI SENI TARI *MODERO* PADA MASYARAKAT MUNA
DI DESA LASUNAPA KECAMATAN DURUKA
KABUPATEN MUNA TAHUN 1946-2016…….. 7-16
Wa Rina
Aslim

PENERAPAN PROGRAM POLITIK ETIS DI DISTRIK KATOBU
ONDERAFDEELING MUNA (1910-1942)……. 17-24
Rosi Aprilani
Hayari

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA TAPI-TAPI KECAMATAN MAROBO
KABUPATEN MUNA (1995-2016)……. . 25-30
Meldy Aswanto
Rifai Nur

PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
KELUARGA DI KECAMATAN KALEDUPA TAHUN 1950-2016……..... 31-40
Murniyati
Faika Burhan

MIGRASI ORANG PATTAE MANDAR KE DESA PEATOA
KECAMATAN LOEA KABUPATEN KOLAKA TIMUR (1980-2016)……... 41-48
Ni'Mah
Ali Hadara

SEJARAH PENGOBATAN TRADISIONAL ORANG BUTON
DI KECAMATAN BATUPOARO KOTA BAUBAU (19862016)……..... 49-62
Wa Ode Lilis Wahid
La Ode Ali Basri

MAKNA SIMBOLIK DALAM PERKAWINAN *ANGKA MATA*
PADA MASYARAKAT MUNA…… 63-72
Sitti Hermina

SEJARAH OBYEK WISATA PANTAI MEMBUKU
DI DESA KADACUA KECAMATAN KULISUSU
KABUPATEN BUTON UTARA (1994-2016)……. 73-81
Harsina
Sarman

SEJARAH OBJEK WISATA PANTAI MEMBUKU DI DESA KADACUA KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA: 1994-2016

Oleh :
Harsina
Sarman

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah objek wisata Pantai Membuku di Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara:1994-2016? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang dibagi atas lima tahapan yaitu: (1) pemilihan topik yang ada kaitannya dengan objek wisata; (2) heuristik; (3) kritik sumber; (4) interpretasi, dan (5) penulisan sejarah. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Objek wisata Pantai Membuku dibuka pada tahun 1994. Sebelum dijadikan sebagai objek wisata, Pantai Membuku masih berupa hutan belukar yang sering didatangi oleh para pelaut dan para pencari ikan, lama kelamaan pantai tersebut mulai didatangi masyarakat sekitar sebagai tempat bersantai kerena mempunyai panorama indah; (2) Perkembangan objek wisata Pantai Membuku terhadap kehidupan sosial budaya di antaranya dapat membuka kesempatan kerja dan menambah penghasilan keuangan desa, (3) Objek wisata Pantai Membuku mengalami perkembangan berkat peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dapat dilihat dari kebijakan pemerintah melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam menunjang keberadaan Pantai Membuku sebagai objek wisata alam.

Kata Kunci : objek wisata, Pantai Membuku, kehidupan sosial budaya.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia tidak hanya dikaruniai tanah air yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga keindahan alam yang mempunyai daya tarik yang mengagumkan. Keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi usaha penanganan dan pengembangan kepariwisataan.

Kelajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong berkembangnya sektor-sektor industri dan mengakibatkan terjadinya transformasi masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Hal tersebut juga membawa perubahan fisik, pranata sosial, pergeseran sistem nilai dan pola kehidupan pada masyarakat. Oleh karena itu, pada abad modern ini tampak jelas bahwa manusia selalu berusaha mengadakan penyesuaian untuk memperoleh kemajuan di segala bidang yang mengarah kepada kesejahteraan hidup pribadi maupun masyarakat.

Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada pemerintahan daerah untuk mengolah wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntunan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah.

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu mendapat pemasukan. Salah satu usaha yang digalakkan pemerintah dalam pembangunan yang dapat memenuhi kepuasan batiniah dan lahiriah adalah pembangunan di bidang pariwisata. Bidang pariwisata dapat memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha, bertambahnya penerimaan kas negara serta kesempatan untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia.

Di Kabupaten Buton Utara misalnya, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan. Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Buton Utara sangat beragam meliputi objek wisata daerah pantai, wisata alam berupa permandian yakni permandian Eengkapala, Eenunu, Pasarambola Ea, dan wisata budaya lainnya yang terdapat di beberapa wilayah yang sangat menarik untuk dikembangkan.

Pantai Membuku merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi dan menjadi salah satu pariwisata favorit di Kabupaten Buton Utara saat ini. Pantai Membuku memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki pantai yang panjang, pasir yang putih dan panorama yang sangat indah. Potensi tersebut sangat menarik bagi masyarakat untuk datang berwisata di Pantai Membuku.

Objek wisata Pantai Membuku terletak di jalur transportasi yang mudah dijangkau. Perkembangan objek wisata ini juga tidak luput dari peran pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Perkembangan tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Indikator-indikator tersebut, belum banyak teridentifikasi dan terpublikasi secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkajinya melalui kajian sejarah dalam berbagai aspek secara ilmiah.

Keberadaan objek wisata Pantai Membuku dapat dikaji menggunakan teori Perencanaan Pengembangan Pariwisata. Perencanaan pariwisata yang baik dan terpadu dapat memberikan manfaat seperti: (1) Dapat menjadi arahan dan pedoman baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan pariwisata karena kegiatan ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang relatif baru, (2) Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan multisektor yang melibatkan berbagai bidang, maka untuk memadukan unsur-unsur tersebut diperlukan perencanaan dan koordinasi, (3) Dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang optimal, (4) Dapat digunakan untuk memilih unsur mana saja dari budaya yang dapat dikomersialkan dan mana yang tidak, (5) Dalam membangun fasilitas pariwisata dan berbagai sektor dapat ditentukan daya dukung lahan optimal yang dapat menjaga kelestarian lingkungan, (6) Untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, (7) Meminimalkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi pengembangan pariwisata, 8) menyiapkan sumber daya manusia, (9) Sebagai dasar dan acuan pembangunan baik bagi pemerintah, swasta dan masyarakat, (10) Untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang dan juga sebagai dasar untuk mengadakan revitalisasi kawasan serta, (11) Dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang akan berimplikasi pada peningkatan devisa negara tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat (Paturusi, 2008: 170).

Di dalam merencanakan pengembangan pariwisata dikenal beberapa hirarki di mana fokus perencanaan pada tiap tingkat hirarki tidak sama. Perencanaan di tingkat umum memberikan kerangka dan arahan bagi perencanaan hirarki di bawahnya, dan demikian seterusnya (Gunawan, 1993 dalam Paturusi, 2008: 156). Secara rinci fokus setiap jenjang hirarki perencanaan diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Pariwisata di Tingkat Internasional (PPI)

Perencanaan pariwisata di tingkat internasional merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang pariwisata antarnegara. Fokus perencanaan diletakkan pada: (1) Jaringan transportasi internasional; (2) Arus dan program wisata antarnegara; (3) Rencana pengembangan yang komplementer antara negara tetangga yang bersama- sama menciptakan daya tarik dan penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana penunjang (fisik) dan; (4) Program promosi dan pemasaran terpadu.

b. Perencanaan Pariwisata di Tingkat Nasional (PPN)

Perencanaan pariwisata di tingkat nasional merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang pariwisata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokusnya pada: (1) Kebijakan pengembangan pariwisata; (2) Rencana struktur tata ruang pariwisata yang mencakup lokasi prioritas pengembangan yang didasari daya tarik utama, penentuan pintu gerbang international, dan

jaringan pelayanan transportasi domestik atau international; (3) Pertimbangan prasarana pokok lainnya; (4) Jumlah, jenis dan kelas fasilitas akomodasi; (5) Rute-rute wisata utama dengan jaringan penghubungnya; (6) Struktur organisasi, kebijakan investasi, dan perizinan; (7) Program pendidikan dan pelatihan; 8) Pengembangan fasilitas dan standar disain; (9) Pertimbangan sosial budaya, lingkungan, ekonomi, dan dampak makro dan; (10) Aspek pelaksanaan di tingkat nasional: pertahapan, strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

c. Perencanaan Pariwisata di Tingkat Wilayah (PPW)

Perencanaan pariwisata di tingkat wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang pariwisata wilayah yang melibatkan beberapa provinsi di Indonesia. Fokus pada: (1) Kebijakan wilayah, (2) Rencana struktur tata ruang pariwisata wilayah yang mencakup jaringan transportasi antarwilayah dan intrawilayah, lokasi pengembangan dan kawasan wisata, dan jenis serta lokasi sumber daya wisata dan daya tariknya, (3) Jumlah, jenis dan kelas fasilitas penunjang akomodasi, 4) Analisis dampak yang lebih spesifik di tingkat wilayah, (5) Pendidikan dan pelatihan tingkat wilayah; (6) Strategi pemasaran dan program promosi, (7) Struktur organisasi, peraturan, dan kebijakan investasi dan, (8) Implementasi mencakup: tahapan pengembangan, program proyek, dan aturan penetapan wilayah.

d. Perencanaan Pariwisata di Tingkat Provinsi (PPP)

Perencanaan pariwisata di tingkat provinsi merupakan arahan kebijakan dan strategi pariwisata wilayah provinsi. Fokus pada: (1) Kebijakan pengembangan pariwisata provinsi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang di Wilayah Provinsi, (2) Rencana Struktur Tata Ruang Pariwisata Provinsi yang mencakup jaringan transportasi antar dan intraprovinsi sampai ke objek-objek utama, (3) Penentuan kota-kota pintu gerbang menuju ke objek utama dan kebutuhan akan fasilitas pendukung (jumlah, jenis, kelas dan lokasi) dan, (4) Rencana jaringan utilitas, pendukung kawasan, dan lokasi objek-objek menarik lainnya, 5. Perencanaan Pariwisata di Tingkat Kabupaten/Kota (PPK), PPK merupakan arahan kebijakan dan strategi pariwisata wilayah kabupaten/kota. Fokus pada: (1) Kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten/kota yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan panjang di wilayah kabupaten/kota, (2) Rencana Struktur Tata Ruang Pariwisata kabupaten/kota yang mencakup jaringan transportasi antar dan intra kabupaten/kota sampai ke objek-objek utama, (3) Penentuan kawasan pintu gerbang menuju ke objek utama dan kebutuhan akan fasilitas pendukung (jumlah, jenis, kelas dan lokasi) dan, (4) Rencana jaringan utilitas, pendukung kawasan, dan lokasi objek-objek menarik lainnya.

e. Perencanaan Pariwisata Kawasan (PPK)

Perencanaan pariwisata kawasan merupakan arahan kebijakan dan strategi pariwisata suatu kawasan dalam kabupaten/kota. Fokus pada: (1) Penentuan lokasi daya tarik wisata, termasuk kawasan konservasi, (2) Arahan lokasi hotel dan akomodasi lainnya, pertokoan dan fasilitas lainnya, tempat rekreasi, dan taman, (3) Sistem jaringan transportasi, kawasan pejalan kaki (pedestrian), serta terminal, (4) Perencanaan prasarana pendukung: air, listrik, air limbah, air hujan, sampah dan telekomunikasi, (5) Studi dampak yang sangat spesifik, (6) Kriteria perancangan (aplikasi arsitektur lokal, lansekap, dan ketinggian bangunan) dan (7) Pola arus wisatawan dalam pemanfaatan fasilitas.

f. Rencana Tapak Kawasan Pariwisata (RTKP)

Rencana tapak kawasan pariwisata merupakan teknik arsitektur suatu fasilitas pariwisata (hotel, vila, restoran). Fokus pada: (1) Perencanaan proyek (bangunan dan/atau kompleks bangunan), (2) Organisasi ruang dan rganisasi massa bangunan dan, 3) Denah, tampak-tampak, potongan, detil, dan perspektif.

Berdasarkan hierarki perencanaan di atas maka Desa Kadacua bisa diletakkan pada hierarki Perencanaan Pariwisata Kawasan. Perencanaan yang dibuat tidak menyimpang dari fokus yang

telah diberikan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, melainkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Perencanaan pariwisata menggunakan konsep perencanaan umum yang sudah terbukti efektif dalam menghadapi proses pengembangan modern, tetapi menyesuaikan diri dengan karakteristik pariwisata tertentu. Pendekatan perencanaan pariwisata mengarah pada aplikasi praktis dalam perumusan kebijakan dan pengembangan pariwisata. Proses perencanaan dasar yang diterangkan sebelum menyediakan kerangka perencanaan yang umum dan penekanan ditempatkan pada konsep perencanaan menjadi berkesinambungan, berorientasi sistem, menyeluruh, terintegrasi, dan lingkungan dengan fokus pada keberhasilan pengembangan yang dapat mendukung keterlibatan masyarakat. Unsur-unsur dalam pendekatan tersebut adalah sebagai berikut (Inskeep, 1991: 28-29):

1) Pendekatan berkesinambungan, inkremental dan fleksibel. Pendekatan ini didasarkan pada kebijakan dan rencana pemerintah, baik secara nasional maupun regional. Perencanaan pariwisata dilihat sebagai suatu proses berkesinambungan yang perlu dievaluasi berdasarkan pemantauan dan umpan balik dalam rangka pencapaian tujuan dan kebijakan pengembangan pariwisata.
2) Pendekatan sistem. Pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, demikian halnya dalam perencanaan dan teknik analisanya.
3) Pendekatan menyeluruh. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan holistik. Seperti pada pendekatan sistem seluruh aspek yang terkait dalam perencanaan pariwisata mencakup institusi, lingkungan dan implikasi sosial ekonominya dianalisis dan direncanakan secara menyeluruh.
4) Pendekatan yang terintegrasi. Suatu pendekatan yang dihubungkan dengan sistem dan pendekatan menyeluruh. Pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai suatu sistem terintegrasi dalam dirinya dan juga terintegrasi dalam keseluruhan rencana dan pola teladan pengembangan daerah.
5) Pendekatan pengembangan berkelanjutan dan lingkungan. Pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan diatur berdasarkan sumber daya budaya dan alami dengan tidak menghabiskan atau menurunkan kualitasnya, tetapi merawat sumber daya secara permanen untuk penggunaan masa depan berkelanjutan. Analisa daya dukung adalah suatu teknik penting menggunakan pendekatan pengembangan berkelanjutan dan lingkungan.
6) Pendekatan masyarakat. Adanya keterlibatan maksimum masyarakat lokal di dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata serta keikutsertaan masyarakat maksimum dalam pengembangan manajemen pariwisata dan manfaat sosial ekonominya.
7) Pendekatan pelaksanaan. Kebijakan pengembangan pariwisata, rencana dan rekomendasi dirumuskan untuk dapat dilaksanakan dan realistis, serta teknik implementasi dipertimbangkan sepanjang seluruh kebijakan dan perumusan rencana dengan teknik implementasi, mencakup suatu pengembangan dan program tindakan atau strategi, secara rinci diadopsi dan diketahui.
8) Aplikasi proses perencanaan sistematis. Proses perencanaan yang sistematis diterapkan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan pada suatu urutan aktivitas logis. Oka A Yoeti, (1997) mengatakan bahwa perencanaan (*planning)* merupakan suatu mata rantai yang esensial antara pemikiran (*thought)* dan pelaksanaan (*action).*

Selanjutnya, keberadaan objek wisata Pantai Membuku juga dapat dikaji menggunakan teori teori pengembangan wilayah pariwisata. Menurut teori tersebut, pengembangan suatu objek wisata harus dapat menciptakan *product style* yang baik, berupa:

a. Objek tersebut memiliki daya tarik untuk disaksikan maupun dipelajari.
b. Mempunyai kekhususan dan berbeda dari objek yang lainnya.
c. Tersedianya fasilitas wisata.
d. Dilengkapi dengan sarana-sarana akomodasi, telekomunikasi, transportasi dan sarana pendukung lainnya.

Pengembangan objek wisata pada dasarnya mencakup tiga hal, yaitu:

1) Pembinaan Produk Wisata.

Merupakan usaha meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai unsur produk pariwisata seperti jasa akomodasi, jasa transportasi, jasa hiburan, jasa tour dan travel serta pelayanan di objek wisata. Pembinaan tersebut dilakukan dengan berbagai kombinasi usaha seperti pendidikan dan latihan, pengaturan dan pengarahan pemerintah, pemberian rangsangan agar tercipta iklim persaingan yang sehat guna mendorong peningkatan mutu produk dan pelayanan.

2) Pembinaan Masyarakat Wisata

Adapun tujuan pembinaan masyarakat pariwisata adalah sebagai berikut:

a) Menggalakkan pemeliharaan segi-segi positif dari masyarakat yang langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata.
b) Mengurangi pengaruh buruk akibat dari pengembangan pariwisata.
c) Pembinaan kerjasama baik berupa pembinaan produk wisata, pemasaran dan pembinaan masyarakat.

3) Pemasaran Terpadu

Untuk pemasaran pariwisata digunakan prinsip-prinsip paduan pemasaran terpadu yang meliputi:

a) Paduan produk yaitu semua unsur produk wisata seperti atraksi seni budaya, hotel dan restoran yang harus ditumbuhkembangkan sehingga mampu bersaing dengan produk wisata lainnya.
b) Paduan penyebaran yaitu pendistribusian wisatawan pada produk wisata yang melibatkan biro perjalanan, penerbangan, angkutan darat dan tour operator.
c) Paduan komunikasi artinya diperlukan komunikasi yang baik sehingga dapat memberikan informasi tentang tersedianya produk yang menarik.
d) Paduan pelayanan yaitu jasa pelayanan yang diberikan kepada wisatawan harus baik sehingga produk wisata akan baik pula.

Untuk mengembangkan daerah wisata, maka suatu daerah harus memiliki tiga syarat (Yoeti, 1996: 177), yaitu:

(1) Daerah tersebut harus mempunyai objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.
(2) Daerah tersebut harus menyediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.
(3) Daerah tersebut harus menyediakan fasilitas untuk berbelanja *(shopping)*, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. Ketiga syarat tersebut sejalan dengan pola tujuan pemasaran pariwisata, yaitu dengan promosi yang dilakukan sebenarnya hendak mencapai sasaran agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu daerah, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang mereka kunjungi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah menurut Kuntowijoyo (2013: 69) yang terdiri atas lima tahapan yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi sumber, (4) interpretasi: analisis dan sintesis, (5) penulisan sejarah.

2. PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Penemuan Objek Wisata Pantai Membuku di Desa Kadacua

Objek Wisata Pantai Membuku pada awalnya ditemukan oleh masyarakat Desa Kadacua yang bernama La Wiwira. La Wiwira merupakan seorang pencari ikan. Pantai Membuku pada saat itu masih berupa hutan belukar dan dikenal dengan sebutan *Mia Mokora* (Membuku) diartikan sebagai hamparan ombak yang sangat keras (Injari, wawancara 25 Maret 2017).

Sebelum tahun 1994, Pantai Membuku masih menjadi tempat persinggahan oleh para pelaut dan sebagai wilayah penangkapan ikan oleh masyarakat sekitarnya. Sebagaimana penjelasan dari informan bahwa "sebelum tahun 1994 objek wisata Pantai Membuku masih bersifat alami dalam arti belum ada usaha pembangunan dari pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Wa Ode Azaria pada saat itu. Setelah pemekaran Kabupaten Buton Utara, Pantai Membuku dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah setempat" (Injari, wawancara 25 Maret 2016).

Pada tahun 1994, Pantai Membuku mulai dikenal oleh masyarakat di luar Desa Kadacua, tetapi kondisi Pantai Membuku masih berupa hutan belukar dan kondisi jalan masih sangat sempit hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Keinginan masyarakat untuk mengembangkan Pantai Membuku tersebut mendapat respon dari Kepala Desa Kadacua pada saat itu. Hal tersebut dikemukakan seorang informan bahwa "Pada tahun 1994, masyarakat Desa Kadacua dan Kepala Desa Kadacua mulai merintis pembukaan jalan ke lokasi Pantai Membuku dan mulai membersikan lokasi Pantai Membuku" (Injari wawancara 25 Maret 2017).

Lokasi pembukaan objek wisata Pantai Membuku terletak tidak jauh dari pemukiman penduduk yang berjarak ± 2 km. Sebelum lokasi objek wisata ini merupakan milik warga Desa Kadacua kemudian diambil oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara dan dijadikan sebagai objek wisata.

2.2 Dampak Perkembangan Objek Wisata Pantai Membuku terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Kadacua

Berikut dikemukakan data informasi dan beberapa temuan penelitian yang menunjukkan bukti tentang dampak perkembangan objek wisata Pantai Membuku terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di Desa Kadacua Kecamatan Kulisusu, baik secara sosial budaya maupun sosial ekonomi.

Menurut La Umbo (Wawancara 3 April 2017) sebagai salah seorang tokoh adat di daerah ini bahwa "Pada umumnya masyarakat memberikan tanggapan positif dengan dibukanya objek wisata Pantai Membuku sebagai wisata masyarakat umum". Anggapan masyarakat tersebut didasari oleh fakta yang ada di lapangan bahwa keberadaan objek wisata Pantai Membuku tidak memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan kehidupan sosial maupun budaya masyarakat yang ada di Desa Kadacua.

Menurut Wa Ea (wawancara 4 April 2017) bahwa justru sebaliknya dengan adanya objek wisata Pantai Membuku, maka kehidupan sosial dan budaya masyarakat semakin menunjukkan perubahan atau perkembangan yang positif. Dicontohkan oleh Wa Ea bahwa pola pergaulan anak muda yang ada di Desa Kadacua dengan masyarakat yang datang (wisatawan) didasari oleh hubungan kekeluargaan yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kondisi aman yang tercipta di kawasan objek wisata Pantai Membuku tidak lepas dari peran dan perhatian dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama yang menangani setiap permasalahan yang muncul.

Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja permasalahan yang muncul di area wisata. Salah seorang tokoh masyarakat mengemukakan bahwa "Mereka (masyarakat) menyadari sepenuhnya akan pengaruh yang kuat terhadap adanya objek wisata Pantai Membuku. Pengaruh itu utamanya datang dari luar. Contohnya seperti adanya pengunjung yang sudah dalam keadaan mabuk atau bahkan pengunjung yang dengan sengaja minum-minuman keras di area wisata Pantai Membuku sehingga tidak jarang menimbulkan keributan di antara pemuda" (La Juna, wawancara 5 April 2017).

2.3 Peranan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Buton Utara dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Membuku

Usaha pemerintah setempat yang bekerja sama dengan masyarakat dalam merintis objek wisata Pantai Membuku akhirnya mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata sejak Tahun 2007. Objek wisata Pantai Membuku dianggap dapat memberi peluang besar di masa depan. Objek wisata tersebut dapat merangsang masyarakat untuk membuat karya-karya kerajinan souvenir sehingga akan menjadi unit bisnis pariwisata yang dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat. Berikut gambaran mengenai keadaan pariwisata yang ada di Desa Kadacua.

a. Jaringan Jalan

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari segi prasarana jalan. Jaringan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dan paling menentukan pelaksanaan pengembangan daerah demi terciptanya keberhasilan membangun pariwisata. Mengenai prasarana jalan di Kecamatan Kulisusu, Pemerintah daerah setempat melakukan langkah-langkah kebijakan pembangunan jalan yang diutamakan ada di daerah yang terisolir.

Menurut hasil penelitian, kondisi transportasi menuju objek wisata Pantai Membuku ini cukup memadai. Perjalanan dari Desa Kadacua ke Pantai Membuku yang berjarak 2 km sudah bisa dijangkau dengan memakai roda dua ataupun roda empat. dibandingkan sebelum menjadi objek wisata, jalanan menuju Pantai Membuku sulit dijangkau karena jalanan masih berbatu-batu dan sangat sempit.

b. Sarana Pariwisata

Untuk menunjang kelancaran pengembangan kepariwisataan, maka yang diperlukan adalah sarana pariwisata. Sarana pariwisata menyediakan keperluan wisatawan untuk memperlancar perjalanan dan kunjungan mereka.

c. Keamanan

Masyarakat Desa Kadacua yang berada di obyek wisata Pantai Membuku sudah cukup berperan dalam upaya mewujudkan program yang terdapat dalam unsur sapta pesona, khususnya pengembangan objek wisata Pantai Membuku. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan bahwa “Mereka senantiasa menjaga keamanan lingkungan objek wisata Pantai Membuku, bila ada keributan di antara pengunjung atau pemuda setempat, maka hal itu dapat diatasi dengan jalan damai. (La Jiha Wawancara 19 April 2017). Dikemukakan pula bahwa bila suasana lingkungan aman dan nyaman, maka para pengunjung akan merasa betah dan tidak was-was sehingga dengan sendirinya mereka akan senang mengunjungi tempat ini.

d. Kebersihan

Selain menciptakan kondisi aman di lingkungan objek wisata, masyarakat juga melakukan atau menjaga kebersihan pantai. Kebersihan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menarik jumlah pengunjung untuk datang ke Pantai Membuku, sebab meningkatnya jumlah pengunjung tentu saja merupakan keuntungan bagi kas Pemda dan kas desa. Oleh karena itu, dilakukan pembenahan-pembenahan khususnya sarana fisik serta kebersihan lingkungan. Adapun hal yang belum dilakukan masyarakat saat ini adalah upaya membuat cenderamata yang menunjukkan ciri khas masyarakat Desa Kadacua.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek Wisata Pantai Membuku dibuka pada tahun 1994. Sebelum dijadikan sebagai objek wisata, Pantai Membuku masih berupa hutan belukar yang sering didatangi oleh para pelaut dan para pencari ikan, lama kelamaan pantai tersebut mulai didatangi masyarakat sekitar sebagai tempat bersantai kerena mempunyai panorama indah.
2. Dampak pengembangan objek wisata Pantai Membuku terhadap kehidupan sosial budaya di antaranya dapat membuka kesempatan kerja yang menambah penghasilan masyarakat Desa Kadacua dan menambah kas keuangan desa, serta meningkatkan pendapatan daerah.

3. Objek wisata Pantai Membuku mengalami perkembangan berkat peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dapat dilihat dari kebijakan pemerintah melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam menunjang keberadaan Pantai Membuku sebagai objek wisata alam. Peran masyarakat dilakukan dengan cara memelihara sikap ramah dan sopan kepada para wisatawan yang datang berkunjung serta menjaga etika untuk menciptakan suasana akrab antara masyarakat setempat dan para wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, Pierre. 1993. *Pendekatan Prosesual.* Surabaya : CNRS.

Chafid, Fandeli. 1985. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan.* Yogyakarta : Library.

Darmajati, R.S. 1974. *Potensi Wisata dan Pengembangan Kepariwisataan.* Jakarta : Dirjen Pariwisata.

Dirjen Pariwisata. 1989. *Panduan Sadar Wisata untuk Masyarakat*. Jakarta: Dirjen Pariwisata

_____. 1990. *Sejarah dan Pembangunan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.* Jakarta. Dirjen Pariwisata.

_____.1994. *Pembinaan Umum Pengatur Wisata dan Pramuwisata.* Jakarta. Dirjen Pariwisata.

Fitriani. 2013. *Dampak Wisata Bahari One Moba'a Terhadap Kehidupan Masyarakat Bajo Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi*. Skripsi Kendari FKIP Universitas Halu Oleo.

Gatot, Murnatmo. 1994. *Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap* Budaya *di Daerah Istimewah Yogyakarta,* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasan, Fuad. 1993. *Renungan Budaya.* Jakarta: Balai Pustaka.

Hadara, Ali, dkk. 2013. *Mingku I Hato Pulo.* Depok: Grafindo Media.

Harianti, 2002. *Obyek Wisata Pantai Toronipa di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Kendari (1980-2002).* Skripsi Kendari FKIP Universitas Halu Oleo.

Herna, 2004. *Obyek Wisata Iwoi Mokula Di Desa Sonai Kecamatan Lambuya Kabupeten Kendari (1980-2003).* Skripsi Kendari FKIP Universitas Halu Oleo.

Inskeep. 1991. *Unsur-Unsur dalam Pendekatan Pariwisata.* Yogyakarta : Grasindo

Irma. 2001. *Pengertian Pariwisata, Http//Www.Pariwisata.id//(online) 7 desember 2001*

Karyono, Hari. 1997. *Kepariwisataan. Jakarta* : Grasindo.

Kaplan. 2000. *Perubahan Budaya Masyarakat.* Yogyakarta : Balai Pustaka.

Kuntowijoyo. 2013 *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kodyat. 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangan di Indonesia*. Jakarta : Dirjen Pariwisata.

Makuta, Sunardi. 1988. *Pariwisata Nusantara*. Jakarta: Dirjen Pariwisata.

Mill. 2000. *Perencanaan Tempat Wisata.* Yogyakarta: Dirjen Pariwisata.

Musanef. 1996. *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia.* Jakarta: PT Gunung Agung.

Nutosusanto, Nugroho. 1978. *Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman.* Jakarta :Yayasan Idayu Press.

Pasaribu, I.L. dan Simanjuntak, B. 1982. *Sosiologi Pengembangan.* Bandung: Tarsito.

Poerwadarminta W.J.S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Sahnur, 2004. *Sejarah Obyek Wisata Pantai Tanjung Taipa di Desa Taipa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe.* Skripsi Kendari FKIP Universitas Halu Oleo.

Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.* Jakarta: Kencana.

Sumardjan, Selo. 1991. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Sukarsa. 1999. *Perencanaan Pengembangan Pariwisata.* Yogyakarta: Dirjen Pariwisata.

Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung : Dunia Pustaka Jaya.

Strak. 1987. *Pendukung Teori Perubahan Budaya.* Yogyakarta: Balai Pustaka.

Steward dan Harsojo. 2000. *Perubahan Budaya.* Yogyakarta: Balai Pustaka.

Utomo, Wiro. 1974. *Kepariwisataan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Yoeti, A, Oka. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata.* Bandung: Angkasa.

Yukti, A. Q. 1990. *Obyek Wisata dan Kegunaannya.* Bandung: Angkasa.


9 772614 439002